Jurnal Wacana Kinerja
Volume 29 | Nomor 2 | November 2026
DOI: 10.31845/jwk.v29i2.1075
p-issn: 1411-4917; e-issn: 2620-9063
http://jwk.lan.go.id

Tata Kelola Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional Perdesaan

Development Administration Governance and Local Human Resource Empowerment in Developing a Rural Traditional Food-Based Creative Economy

Siti Khumayah[1], Leni Rohida[2], dan Riyadi[3]
[1,2] *Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Swadaya Gunung Jati*
Jalan Terusan Pemuda No. 1A Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
Telp. 0231-206558 dan Faks. 0231-236742

[3] *Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN, Lembaga Administrasi Negara*
Jalan Kiara Payung KM. 4,7 Sukasari, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Telp. 022-7790048 dan Faks. 022-7790055

Abstract

This study aims to analyze the relationship between development administration governance, local human resource empowerment, and the sustainability of traditional food-based creative economies in rural areas. The study employs a Systematic Literature Review approach based on the PRISMA 2020 guidelines. The literature was searched through Google Scholar and Garuda, focusing on publications concerning development administration, community empowerment, rural creative economy, traditional food, MSME digitalization, and economic development. Articles were selected based on relevance, full-text availability, clarity of publication identity, and contribution to the research questions. The data were analyzed through data extraction and thematic synthesis. The findings are as follows. First, development administration functions as enabling governance through policy formulation, planning, cross-sector coordination, facilitation, institutional strengthening, monitoring, and evaluation. Second, local human resource empowerment requires more than technical training; it also involves production skills, innovation, entrepreneurship, business management, digital literacy, and entrepreneurial agency. Third, village economic institutions, cross-sector collaboration, digital marketing, and cultural preservation constitute mechanisms linking policy support to business sustainability. This study proposes a Governance–Capability–Cultural Digital Ecosystem Model that links development governance, local capabilities, economic institutions, digital market access, and cultural values to the sustainability of traditional food-based creative economies.

Keywords: *development administration, rural creative economy, traditional food, local human resource empowerment, systematic literature review.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan tata kelola administrasi pembangunan, pemberdayaan sumber daya manusia lokal, dan keberlanjutan ekonomi kreatif berbasis makanan tradisional di perdesaan. Penelitian menggunakan

[2] Email: leni.rohida@ugj.ac.id

pendekatan *Systematic Literature Review* dengan mengadaptasi pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan secara terstruktur melalui Google Scholar dan Garuda dengan fokus pada publikasi ilmiah mengenai administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif perdesaan, makanan tradisional, digitalisasi UMKM, dan pembangunan ekonomi lokal. Artikel diseleksi berdasarkan relevansi, ketersediaan teks lengkap, kejelasan identitas publikasi, dan kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian. Data dianalisis melalui ekstraksi informasi dan sintesis tematik. Hasilnya menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, administrasi pembangunan berperan sebagai tata kelola pemungkin melalui perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi lintas aktor, fasilitasi, penguatan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi. Kedua, pemberdayaan SDM lokal tidak cukup hanya melalui pelatihan teknis, tetapi juga mencakup penguatan keterampilan produksi, inovasi, kewirausahaan, manajemen usaha, literasi digital, dan agensi pelaku usaha. Ketiga, kelembagaan ekonomi desa, kolaborasi lintas aktor, digitalisasi pemasaran, dan pelestarian nilai budaya merupakan mekanisme yang menghubungkan dukungan kebijakan dengan keberlanjutan usaha. Kajian ini menawarkan Model Tata Kelola–Kapabilitas–Ekosistem Budaya Digital yang menjelaskan bahwa keberlanjutan ekonomi kreatif makanan tradisional tercipta melalui keterhubungan antara tata kelola pembangunan, kapabilitas SDM lokal, kelembagaan ekonomi, akses pasar digital, dan nilai budaya lokal.

Kata Kunci: administrasi pembangunan, ekonomi kreatif perdesaan, makanan tradisional, pemberdayaan SDM lokal, *systematic literature review*.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan perdesaan tidak dapat lagi ditempatkan hanya sebagai pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan, melainkan sebagai proses pembangunan yang mengintegrasikan peningkatan kapasitas pemerintah, penguatan kelembagaan lokal, pemanfaatan sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif administrasi pembangunan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program, tetapi juga oleh kemampuan administrasi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengimplementasikan, dan menyesuaikan kebijakan dengan kompleksitas kondisi lokal. Rondinelli (1982) menegaskan bahwa pembangunan di negara berkembang menghadapi persoalan kompleksitas, ketidakpastian, keterbatasan kapasitas administratif, serta kebutuhan akan perencanaan yang lebih adaptif dan pembelajaran dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks pembangunan perdesaan, pendekatan pembangunan terpadu juga diperlukan karena intervensi yang bersifat tunggal atau sektoral memiliki keterbatasan dalam menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Rondinelli, 1979). Sejalan dengan itu, Cheema dan Rondinelli (1983) menempatkan penguatan kapasitas lokal sebagai bagian penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan pembangunan perdesaan, terutama melalui penguatan kemampuan pemerintah lokal dan kelembagaan pelaksana pembangunan. Dengan demikian, desa dapat dipahami sebagai arena administrasi pembangunan tempat kebijakan diterjemahkan ke dalam program, sumber daya lokal dimobilisasi, kelembagaan diperkuat, dan masyarakat dilibatkan sebagai aktor pembangunan.

Salah satu potensi yang relevan bagi pembangunan ekonomi desa adalah makanan tradisional. Makanan tradisional memuat nilai ekonomi sekaligus nilai budaya karena berkaitan dengan bahan baku lokal, pengetahuan antargenerasi, identitas daerah, dan praktik sosial masyarakat. Bessière (1998), Everett dan Aitchison (2008), serta Sims (2009) menyatakan bahwa makanan lokal dapat menjadi penggerak pembangunan wilayah melalui

keterkaitannya dengan identitas, pariwisata, produksi lokal, dan pengalaman autentik. Dalam konteks ekonomi kreatif, makanan tradisional dapat memperoleh nilai tambah melalui inovasi produk, standardisasi kualitas, pengemasan, merek, narasi budaya, dan perluasan akses pasar.

Namun, potensi kuliner lokal belum dengan sendirinya menghasilkan ekonomi kreatif yang kuat dan berkelanjutan. Meskipun berbagai bentuk dukungan terhadap UMKM telah berkembang, tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha makanan tradisional tidak cukup dilakukan melalui intervensi yang berdiri sendiri. Temuan mengenai pentingnya bantuan pemerintah, kemitraan, asosiasi usaha, legalitas, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi, dan digitalisasi menunjukkan perlunya ekosistem pendukung yang menghubungkan peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan akses pasar dan kelembagaan usaha (Septiyanti *et al*., 2026). Dalam konteks perdesaan, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena pengembangan makanan tradisional tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kinerja usaha, tetapi juga dengan pemanfaatan sumber daya lokal, pelestarian identitas budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, persoalan yang perlu dikaji bukan semata-mata keterbatasan pelaku usaha, melainkan bagaimana berbagai sumber daya dan intervensi tersebut dapat diintegrasikan melalui administrasi pembangunan desa agar pengembangan makanan tradisional berlangsung secara lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian telah membahas ekonomi kreatif perdesaan melalui kolaborasi lintas sektor, digitalisasi UMKM, pemberdayaan masyarakat, atau makanan lokal sebagai warisan budaya. Penelitian Rosyadi *et al*. (2021) menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif perdesaan. Del Soldato dan Massari (2024) serta Zollet dan Qu (2024) menyoroti peran kreativitas dan strategi digital dalam revitalisasi warisan budaya makanan. Dwiputri *et al*. (2025) menunjukkan bahwa adopsi digital UMKM dipengaruhi oleh kapasitas usaha dan kemampuan pelaku usaha dalam menjaga komitmen jangka panjang. Meskipun demikian, literatur tersebut masih memperlihatkan tiga kesenjangan. Pertama, terdapat kesenjangan konseptual karena administrasi pembangunan umumnya dibahas sebagai fungsi kebijakan, perencanaan, dan koordinasi, sedangkan pemberdayaan SDM dibahas sebagai peningkatan kapasitas individu atau kelompok. Hubungan mekanistik antara keduanya dalam pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional masih belum dijelaskan secara memadai. Kedua, terdapat kesenjangan empiris karena kajian ekonomi kreatif desa, digitalisasi UMKM, dan makanan lokal lebih sering dibahas secara terpisah. Sintesis yang berfokus pada makanan tradisional sebagai modal budaya sekaligus objek tata kelola pembangunan perdesaan masih terbatas. Ketiga, terdapat kesenjangan metodologis karena bukti ilmiah tersebar dalam disiplin administrasi publik, pembangunan perdesaan, kewirausahaan, budaya, pariwisata, dan digitalisasi. Kondisi ini membuat kajian naratif berisiko hanya menjadi kumpulan konsep tanpa menunjukkan pola, perbedaan temuan, dan mekanisme yang menjelaskan keberlanjutan usaha. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana tata kelola administrasi pembangunan, pemberdayaan SDM lokal, kelembagaan ekonomi, digitalisasi, dan pelestarian budaya saling berhubungan dalam membentuk keberlanjutan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan.

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1 Administrasi Pembangunan dalam Perspektif Administrasi Negara

Administrasi pembangunan merupakan salah satu cabang penting dalam kajian administrasi publik yang berkaitan dengan kapasitas pemerintah dalam merumuskan, mengorganisasi, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan, program, serta proyek pembangunan. Dalam perkembangannya, administrasi pembangunan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif untuk melaksanakan keputusan pemerintah, tetapi sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan (Ohemeng, 2023). Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki orientasi yang lebih kuat pada perubahan, pencapaian tujuan pembangunan dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam konteks negara berkembang, administrasi pembangunan berkaitan dengan kemampuan birokrasi dan institusi publik dalam mengelola proses pembangunan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan setempat. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa hubungan antara administrasi publik dan pembangunan semakin menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan, tata kelola, desentralisasi, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam merespons perubahan lingkungan pembangunan (El Bagoury & Reyad, 2023; Mangai, 2022). Administrasi pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan negara dalam menghubungkan kebijakan dan implementasi serta membangun kapasitas organisasi serta masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan (Elliott *et al*., 2024).

Secara substantif, aspek administrasi pembangunan dapat dilihat dari beberapa dimensi utama, yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan kebijakan dan program, pengorganisasian dan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas kelembagaan, pembiayaan dan evaluasi, serta inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan. Perkembangan mutakhir juga menempatkan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola partisipatif sebagai bagian penting dalam administrasi pembangunan, sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian target ekonomi, tetapi juga dari kemampuan institusi publik dalam menciptakan pembangunan inklusif, berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Puppim de Oliveira, 2021; Syafaruddin, 2025). Dalam konteks pembangunan lokal dan perdesaan, perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak koordinasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lokal, dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, administrasi pembangunan pada tingkat desa dapat dipahami sebagai proses mengelola sumber daya, kelembagaan, kebijakan dan partisipasi masyarakat untuk mengubah potensi lokal menjadi kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam perkembangan administrasi negara kontemporer, pendekatan pembangunan tidak lagi hanya bersifat sentralistik dan *top-down*. Administrasi publik modern bergerak menuju tata kelola yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berbasis jejaring. Osborne (2006) menjelaskan bahwa paradigma *New Public Governance* menekankan pentingnya relasi antarlembaga, jaringan kebijakan, kemitraan, dan koordinasi lintas aktor dalam penyelenggaraan urusan publik. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi bertindak sebagai aktor tunggal, tetapi sebagai pengarah, fasilitator, koordinator, dan penghubung antara masyarakat, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan lembaga lokal. Pendekatan tersebut relevan dengan pembangunan ekonomi kreatif di perdesaan. Pengembangan ekonomi kreatif

berbasis makanan tradisional tidak cukup dilakukan melalui bantuan peralatan atau pelatihan sesaat, tetapi membutuhkan tata kelola pembangunan yang terarah. Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu menjalankan fungsi administrasi pembangunan melalui penyusunan kebijakan, perencanaan program, penganggaran, pendampingan, fasilitasi perizinan, pembukaan akses pasar, penguatan kelembagaan usaha, serta evaluasi keberlanjutan program. Dengan demikian, administrasi pembangunan menjadi fondasi struktural yang memungkinkan potensi lokal desa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang bernilai tambah.

Teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif melibatkan lembaga publik dan aktor non-negara dalam forum bersama untuk mengambil keputusan secara konsensus. Kerangka ini menekankan beberapa unsur penting, yaitu kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan hasil sementara yang dapat memperkuat kolaborasi. Dalam konteks ekonomi kreatif perdesaan, teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan pelaku usaha lokal, komunitas kreatif, perguruan tinggi, BUMDes, koperasi, lembaga keuangan, dan pasar. Selain itu, konsep *coproduction* dari Ostrom (1996) juga penting untuk memahami pembangunan perdesaan. Ostrom menjelaskan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima layanan publik, tetapi dapat menjadi mitra dalam menghasilkan nilai publik. Dalam pengembangan makanan tradisional, masyarakat desa merupakan pemilik pengetahuan lokal, keterampilan produksi, resep turun-temurun, jaringan sosial, dan identitas budaya. Oleh karena itu, administrasi pembangunan yang efektif harus menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek program.

Dengan demikian, administrasi pembangunan dalam kajian ini dipahami sebagai proses tata kelola pembangunan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, fasilitasi, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Administrasi pembangunan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga transformatif, yaitu mendorong perubahan kapasitas masyarakat desa agar mampu mengembangkan sumber daya lokal secara produktif, kreatif, inklusif, dan berkelanjutan.

2.2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Lokal

Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal merupakan konsep utama dalam pembangunan perdesaan. Pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat agar mampu mengakses sumber daya, mengambil keputusan, mengembangkan usaha, memperluas jaringan, dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Perkins & Zimmerman (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan proses peningkatan kapasitas individu, organisasi, dan komunitas untuk mengendalikan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan kelembagaan.

Kabeer (1999) menawarkan kerangka pemberdayaan melalui tiga dimensi utama, yaitu *resources*, *agency*, dan *achievements*. *Resources* merujuk pada akses terhadap sumber daya material, manusia, sosial, dan kelembagaan. *Agency* merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk menentukan pilihan dan bertindak. Sementara itu, *achievements* merujuk pada hasil nyata dari proses pemberdayaan, seperti peningkatan pendapatan,

kemandirian, posisi tawar, dan kesejahteraan. Kerangka ini relevan untuk menjelaskan pemberdayaan SDM lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional.

Dalam konteks perdesaan, pemberdayaan SDM lokal juga dapat dipahami melalui perspektif aset dan kapabilitas. Bebbington (1999) menekankan bahwa keberlanjutan penghidupan perdesaan tidak hanya bergantung pada modal ekonomi, tetapi juga pada modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan kemampuan masyarakat menghubungkan aset-aset tersebut dengan negara, pasar, dan masyarakat sipil. Dengan kata lain, masyarakat desa dapat berkembang apabila mereka tidak hanya memiliki sumber daya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengelola, menghubungkan, dan mengubah sumber daya tersebut menjadi manfaat ekonomi dan sosial.

Dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha makanan tradisional perlu diarahkan pada beberapa dimensi yang saling berkaitan. Pertama, kapasitas teknis produksi**,** yang mencakup penguasaan pengetahuan dan *know-how* dalam pengolahan makanan, pemanfaatan sumber daya lokal, resep tradisional, serta kemampuan menjaga kualitas produk. Anthopoulou (2010) menunjukkan bahwa usaha makanan tradisional di perdesaan dapat berkembang dengan memanfaatkan sumber daya lokal, resep tradisional, tenaga keluarga, serta pengetahuan dan *know-how* yang diperoleh dari pengalaman.

Kedua, kapasitas kewirausahaan dan inovasi usaha meliputi kemampuan membaca kebutuhan pasar, mengembangkan produk, melakukan adaptasi, serta mengelola usaha secara berkelanjutan. Anthopoulou (2010) menemukan bahwa pelaku usaha makanan lokal di perdesaan tidak hanya mengandalkan pengetahuan tradisional, tetapi juga menunjukkan karakter dinamis dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan permintaan konsumen. Inovasi juga perlu dilakukan secara adaptif dengan tetap mempertahankan karakter tradisional produk (Guerrero *et al*., 2009); (Vanhonacker *et al*., 2013).

Ketiga, literasi digital dan kemampuan pemasaran**,** terutama dalam pemanfaatan media sosial, *e-commerce*, fotografi produk, desain visual, *branding*, dan komunikasi pemasaran. Studi pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) jamu tradisional menunjukkan bahwa pelatihan pemasaran digital, *branding*, dan desain kemasan dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan media sosial dan platform *e-commerce* serta memperluas jangkauan pemasaran (Dewi *et al*., 2025). Oleh karena itu, literasi digital dapat dipahami sebagai kapasitas pendukung yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan produksi diterjemahkan menjadi akses pasar yang lebih luas.

Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pengorganisasian pelaku usaha dalam kelompok, komunitas, koperasi, atau jejaring ekonomi lokal. Anthopoulou (2010) menunjukkan bahwa usaha makanan lokal di perdesaan berkembang dalam konteks hubungan antara sumber daya lokal, keluarga, pasar, dan inisiatif kewirausahaan. Sementara itu, pengalaman koperasi perempuan dalam produksi pangan lokal menunjukkan bahwa bentuk kelembagaan kolektif dapat menjadi wadah produksi dan pemasaran produk makanan tradisional di wilayah perdesaan. Dalam konteks penelitian ini, penguatan kelembagaan dipahami sebagai upaya meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk bekerja secara kolektif, membangun jejaring, memperoleh dukungan, dan memperkuat posisi dalam rantai nilai. Adapun integrasi secara khusus dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu didukung oleh literatur tersendiri mengenai BUMDes karena belum menjadi temuan langsung dari fokus utama kajian tentang makanan tradisional.

Kelima, kapasitas menjaga identitas dan nilai budaya, sehingga modernisasi produk tidak menghilangkan karakter tradisionalnya. Aspek ini memiliki dukungan yang kuat dalam literatur makanan tradisional. Penelitian mengenai inovasi makanan tradisional menunjukkan bahwa penerimaan inovasi berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap karakter tradisional produk (Vanhonacker *et al*., 2013). Penelitian Iskandar *et al*. (2023) memperlihatkan pentingnya pengetahuan lokal masyarakat perdesaan dalam

keberlangsungan makanan tradisional, sedangkan literatur mengenai autentisitas makanan menempatkan identitas, asal-usul, dan karakter tradisional sebagai bagian penting dari nilai produk. Dengan demikian, pengembangan kapasitas SDM tidak semata-mata diarahkan pada kemampuan teknis dan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha untuk memahami, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan nilai budaya yang melekat pada produk makanan tradisional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemberdayaan SDM lokal dalam kajian ini tidak dimaknai secara sempit sebagai pelatihan keterampilan, tetapi sebagai proses peningkatan kapasitas masyarakat desa agar mampu menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi kreatif. SDM lokal yang berdaya tidak hanya mampu memproduksi makanan tradisional, tetapi juga mampu berinovasi, mengelola usaha, membaca peluang pasar, memanfaatkan teknologi, membangun jejaring, dan menjaga nilai budaya lokal.

2.3 Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Lokal

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, ide, pengetahuan, keterampilan, budaya, dan inovasi. Boccella dan Salerno (2016) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif dan industri budaya dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena mampu menciptakan nilai tambah melalui kreativitas dan ekspresi budaya. Ekonomi kreatif juga memiliki hubungan erat dengan pembangunan lokal karena dapat memanfaatkan keunikan wilayah, identitas budaya, dan potensi masyarakat setempat sebagai sumber daya ekonomi. Dalam konteks perdesaan, ekonomi kreatif memiliki fungsi strategis.

Pertama, ekonomi kreatif dapat menciptakan sumber pendapatan baru melalui pengembangan produk dan jasa berbasis kreativitas serta potensi lokal. UNCTAD (2024) menunjukkan bahwa ekonomi kreatif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pendapatan melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis kreativitas. Kedua, ekonomi kreatif dapat memperluas kesempatan kerja dan partisipasi ekonomi, terutama bagi perempuan, pemuda, dan kelompok usaha kecil. UNCTAD (2022, 2024) menempatkan penciptaan pekerjaan, peningkatan pendapatan, inklusi, serta partisipasi perempuan dan pemuda sebagai bagian penting dari pengembangan ekonomi kreatif. Ketiga, ekonomi kreatif dapat memperkuat identitas lokal melalui pemanfaatan budaya, pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik masyarakat setempat sebagai bagian dari produk kreatif (UNCTAD, 2021, 2024). Keempat, ekonomi kreatif dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk lokal sehingga produk berbasis potensi daerah memiliki peluang menjangkau pasar yang lebih luas melalui pengembangan desain, teknologi, pemasaran, dan kekayaan intelektual (UNCTAD, 2021, 2024). Kelima, ekonomi kreatif dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dengan memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi, bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ekonomi kreatif juga menempatkan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan identitas budaya daerah, inovasi, dan pengembangan potensi daerah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif (Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, 2026).

Bakhshi dan McVittie (2009) menunjukkan bahwa industri kreatif memiliki potensi mendorong inovasi pada sektor ekonomi yang lebih luas melalui hubungan rantai pasok, interaksi antarpelaku usaha, dan pertukaran pengetahuan. Pemikiran ini relevan dalam pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional karena sektor kuliner tidak berdiri sendiri. Produk makanan tradisional terhubung dengan sektor pertanian, perdagangan,

pariwisata, desain kemasan, transportasi, pemasaran digital, dan kelembagaan lokal. Dengan demikian, pengembangan makanan tradisional dapat menciptakan efek ganda bagi ekonomi desa apabila dikelola melalui administrasi pembangunan yang baik.

Dalam perspektif administrasi negara, ekonomi kreatif tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik. Pemerintah perlu menyediakan dukungan kebijakan yang terintegrasi untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pelaku ekonomi kreatif berkembang secara berkelanjutan. Dukungan tersebut dapat mencakup regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, fasilitasi akses pasar dan promosi, kemudahan legalitas dan sertifikasi, serta dukungan pembiayaan. Dalam konteks ekonomi kreatif perdesaan, Rosyadi *et al*. (2021) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi desa membutuhkan kebijakan publik yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik pelaku ekonomi kreatif serta pengembangan kolaborasi lintas sektor.

Pada tingkat yang lebih luas, kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia juga diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku melalui pelatihan dan pendampingan, pengembangan jejaring, fasilitasi pembiayaan, serta promosi dan pengembangan ekosistem kreatif (OECD, 2025). Kebutuhan terhadap intervensi tersebut semakin relevan karena industri mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan akses dan modal, kualitas sumber daya manusia dan manajemen, serta aspek legalitas (BPS, 2025). Dalam sektor pangan, penelitian Septiyanti *et al*. (2026) menunjukkan bahwa inovasi, pendidikan, status legalitas, kemitraan, keikutsertaan dalam asosiasi usaha, dan bantuan pemerintah berhubungan positif dengan keputusan pelaku usaha mikro dan kecil pangan dalam menerapkan digital marketing.

Sementara itu, penelitian mengenai hambatan kebijakan publik pada UMKM ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan kapasitas administratif dan pola kebijakan pemerintah daerah yang kurang adaptif dapat membatasi dukungan terhadap pengembangan daya saing ekonomi kreatif (Purbasari *et al*., 2021). Dengan demikian, keberlanjutan ekonomi kreatif tidak cukup ditentukan oleh kapasitas pelaku usaha, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun lingkungan kebijakan yang mendukung, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

2.4 Makanan Tradisional sebagai Modal Budaya dan Ekonomi Kreatif Perdesaan

Makanan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Bessière (1998) menjelaskan bahwa makanan dan gastronomi lokal dapat menjadi penanda identitas wilayah, sarana promosi produk lokal, dan daya tarik pembangunan perdesaan. Dalam konteks ini, makanan tradisional tidak hanya dipahami sebagai produk konsumsi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan simbolik. Everett dan Aitchison (2008) juga menunjukkan bahwa makanan lokal dapat memperkuat identitas regional, melestarikan warisan budaya, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan mendukung regenerasi wilayah. Makanan tradisional memiliki kemampuan untuk menghubungkan produksi, konsumsi, budaya, pariwisata, dan pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, makanan tradisional dapat menjadi salah satu basis penting ekonomi kreatif perdesaan apabila didukung oleh inovasi, pengemasan, legalitas usaha, promosi, dan tata kelola yang baik. Sims (2009) menambahkan bahwa makanan lokal dapat menciptakan pengalaman autentik dan memperkuat keberlanjutan pembangunan berbasis tempat. Konsep ini penting karena konsumen modern tidak hanya membeli produk makanan berdasarkan rasa, tetapi juga berdasarkan cerita, asal-usul, keunikan, identitas lokal, dan nilai budaya yang melekat pada produk tersebut. Dalam hal ini, makanan tradisional desa dapat dikembangkan

menjadi produk ekonomi kreatif melalui narasi budaya, desain kemasan, promosi digital, festival kuliner, wisata desa, dan jejaring pasar lokal maupun nasional.

Duxbury *et al*. (2017) menekankan bahwa kebijakan budaya dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan, antara lain melalui pelestarian praktik budaya, penguatan hak budaya, peningkatan kesadaran keberlanjutan, dan pembentukan warga yang peduli pada keberlanjutan. Pemikiran ini relevan karena pengembangan makanan tradisional tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus menjaga keaslian, keberlanjutan bahan baku, nilai budaya, dan keterlibatan masyarakat lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, makanan tradisional dalam kajian ini diposisikan sebagai modal budaya sekaligus modal ekonomi. Sebagai modal budaya, makanan tradisional merepresentasikan identitas, kearifan lokal, nilai sosial, dan warisan masyarakat desa. Sebagai modal ekonomi, makanan tradisional dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang menciptakan pendapatan, lapangan kerja, dan nilai tambah ekonomi. Titik temu antara keduanya membutuhkan administrasi pembangunan yang sensitif terhadap budaya dan pemberdayaan SDM lokal yang berorientasi pada inovasi.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengembangan ekonomi lokal menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama menuju tata kelola yang melibatkan berbagai aktor. Osborne (2006) menjelaskan bahwa *New Public Governance* menempatkan jejaring, kolaborasi, dan kemitraan sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan administrasi publik. Perspektif tersebut diperkuat oleh Ansell dan Gash (2008) melalui konsep *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen bersama, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif dalam proses kolaboratif. Dalam konteks ekonomi kreatif perdesaan, Rosyadi *et al*. (2021) meneliti kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif perdesaan melalui kasus *Bengkoang Creative Hub* di Banyumas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif berbasis potensi desa memerlukan dukungan kebijakan yang adaptif, kolaborasi *pentahelix*, penguatan kelembagaan, dan jaringan sosial. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya dirancang dalam mekanisme kebijakan pemberdayaan ekonomi kreatif desa yang sistematis.

Dari perspektif pemberdayaan, Kabeer (1999) memandang pemberdayaan melalui tiga dimensi, yaitu *resources, agency, dan achievements*. Perspektif ini menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, dan pencapaian hasil sebagai bagian dari proses pemberdayaan. Sementara itu, Bebbington (1999) menunjukkan bahwa penghidupan masyarakat perdesaan bergantung pada kemampuan mengelola berbagai bentuk aset dan menghubungkannya dengan negara, pasar, dan masyarakat sipil. Kedua perspektif tersebut relevan untuk menjelaskan pengembangan SDM lokal karena kapasitas masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keterampilan individu, tetapi juga oleh akses terhadap sumber daya, kelembagaan, jaringan, dan pasar.

Penelitian Bessière (1998), Everett dan Aitchison (2008), serta Sims (2009) sama-sama menempatkan makanan lokal sebagai bagian dari identitas wilayah, daya tarik budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga penelitian tersebut memberikan dasar yang kuat bahwa makanan tradisional dapat menjadi aset pembangunan lokal. Namun, sebagian besar kajian tersebut berada dalam konteks pariwisata dan identitas regional, belum secara langsung menghubungkannya dengan administrasi pembangunan dan pemberdayaan SDM lokal di desa. Penelitian Del Soldato dan Massari (2024) serta Zollet dan Qu (2024) memperluas kajian makanan lokal dengan melihat pentingnya kreativitas, strategi digital, revitalisasi budaya

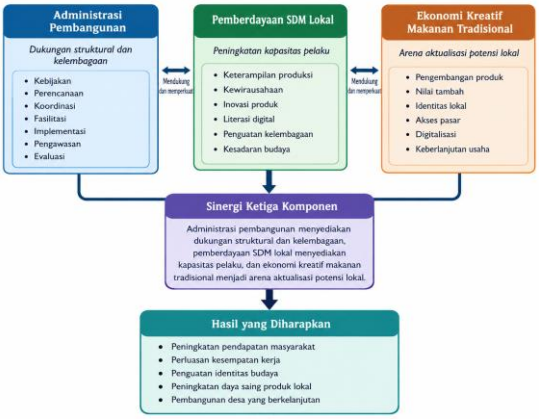
makanan, keberlanjutan, dan *place-making*. Zollet dan Qu (2024) menekankan bahwa budaya makanan lokal dapat direvitalisasi melalui aktivitas kewirausahaan kreatif yang menghubungkan wilayah desa dan kota. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas peran pemerintah desa dan administrasi pembangunan dalam membangun ekosistem kelembagaan bagi pelaku makanan tradisional. Penelitian mengenai digitalisasi UMKM, seperti Nambisan (2017) dan Dwiputri *et al.* (2025), menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperluas peluang kewirausahaan dan memperkuat daya saing usaha kecil. Namun, penelitian seperti ini cenderung lebih menekankan dimensi teknologi dan kewirausahaan, dan belum secara komprehensif membahas integrasi digitalisasi dengan pelestarian makanan tradisional, pemberdayaan SDM lokal, dan administrasi pembangunan perdesaan.

Research gap penelitian ini tidak terletak pada ketiadaan penelitian mengenai makanan tradisional, karena literatur mengenai makanan tradisional telah berkembang cukup luas. Gap penelitian terletak pada keterbatasan integrasi perspektif administrasi pembangunan dalam menjelaskan bagaimana makanan tradisional dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif perdesaan melalui pemberdayaan SDM lokal, penguatan kelembagaan, koordinasi antaraktor, pemanfaatan teknologi digital, dan dukungan kebijakan pemerintah desa**.** Perspektif tersebut penting karena keberhasilan pengembangan makanan tradisional tidak hanya ditentukan oleh kreativitas dan kemampuan pelaku usaha, tetapi juga oleh kapasitas tata kelola pembangunan lokal dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha sekaligus mempertahankan nilai budaya makanan tradisional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga perspektif utama, yaitu administrasi pembangunan, pemberdayaan SDM lokal, dan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan. Penelitian ini tidak hanya melihat ekonomi kreatif sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai hasil dari tata kelola pembangunan dan kapasitas masyarakat lokal. Pertama, penelitian ini menempatkan administrasi pembangunan sebagai *enabling governance*, yaitu tata kelola yang memungkinkan masyarakat desa mengembangkan potensi lokal melalui kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, administrasi pembangunan tidak hanya dipahami sebagai proses birokratis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan dan penggerak ekonomi lokal. Kedua, penelitian ini memosisikan SDM lokal sebagai aktor utama dan *co-producer* pembangunan. Masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi pelaku yang memproduksi, mengembangkan, memasarkan, dan menjaga keberlanjutan makanan tradisional sebagai produk ekonomi kreatif. Kebaruan ini penting karena memperkuat pendekatan partisipatif dalam administrasi negara. Ketiga, penelitian ini menghubungkan makanan tradisional dengan ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan digitalisasi. Makanan tradisional tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai produk kreatif yang dapat dikembangkan melalui inovasi, pengemasan, narasi lokal, pemasaran digital, dan penguatan kelembagaan usaha. Keempat, penelitian ini menawarkan kerangka sinergis antara kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kerangka tersebut menjelaskan bahwa keberlanjutan ekonomi kreatif makanan tradisional hanya dapat tercapai apabila terdapat hubungan yang kuat antara kebijakan pemerintah, kapasitas SDM lokal, kelembagaan ekonomi desa, akses pasar, teknologi digital, dan pelestarian kearifan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya pada kajian administrasi pembangunan berbasis potensi lokal. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam merancang program ekonomi kreatif yang lebih terarah, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoretis di atas, kerangka pemikiran kajian ini dibangun atas hubungan antara tiga komponen utama. Komponen pertama adalah administrasi pembangunan, yang mencakup fungsi kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Komponen kedua adalah pemberdayaan SDM lokal yang mencakup peningkatan keterampilan produksi, kewirausahaan, inovasi, literasi digital, penguatan kelembagaan, dan kesadaran budaya. Komponen ketiga adalah ekonomi kreatif makanan tradisional yang mencakup pengembangan produk, nilai tambah, identitas lokal, akses pasar, digitalisasi, dan keberlanjutan usaha. Hubungan ketiga komponen tersebut membentuk model yang menjelaskan bahwa administrasi pembangunan menyediakan dukungan struktural dan kelembagaan, pemberdayaan SDM lokal menyediakan kapasitas pelaku, sedangkan ekonomi kreatif makanan tradisional menjadi arena aktualisasi potensi lokal. Apabila ketiganya berjalan secara sinergis, maka pengembangan ekonomi kreatif perdesaan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, penguatan identitas budaya, peningkatan daya saing produk lokal, dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kerangka pemikiran tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengembangan Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional di Perdesaan
Sumber: Analisis Penulis, 2026.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan mensintesis literatur ilmiah secara terstruktur. Pedoman PRISMA 2020 diadaptasi untuk meningkatkan keterlacakan proses penelusuran dan seleksi sumber. Pendekatan ini dipilih karena isu administrasi pembangunan, pemberdayaan SDM lokal, ekonomi kreatif, makanan tradisional, digitalisasi, dan pembangunan perdesaan berkembang pada berbagai disiplin ilmu dan membutuhkan sintesis lintas kajian. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan Garuda. Kedua sumber dipilih untuk memperoleh artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan konteks administrasi publik serta pembangunan perdesaan di Indonesia. Penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu: administrasi pembangunan, tata kelola pembangunan, pemberdayaan SDM lokal, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif perdesaan, makanan tradisional, UMKM kuliner, *traditional food*, *traditional foods*, *local food*, *food heritage*, *rural creative economy*, *local development*, *local human resources*, *community*

empowerment, empowerment, *local economic development, creative economy*, *rural development*, dan *governance*.

Kata kunci digunakan secara bertahap dan dikombinasikan dengan operator AND serta OR agar hasil pencarian tetap terarah pada hubungan antara tata kelola, pemberdayaan, ekonomi kreatif, makanan tradisional, dan konteks perdesaan. Penelusuran literatur dibatasi pada publikasi periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2024. Rentang waktu tersebut dipilih untuk menangkap perkembangan kajian makanan tradisional secara lebih komprehensif, mulai dari pembahasan makanan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya, identitas lokal, dan pembangunan wilayah hingga perkembangan kajian mengenai inovasi produk, kewirausahaan, ekonomi kreatif, revitalisasi, keberlanjutan, dan pengembangan lokal. Tahun 1998 digunakan sebagai batas awal karena Bessière (1998) memberikan landasan penting mengenai hubungan antara makanan tradisional, warisan lokal, dan pembangunan wilayah perdesaan.

Kriteria inklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki relevansi langsung dengan tujuan kajian. Artikel dimasukkan apabila: (1) diterbitkan dalam periode 1998–2024; (2) merupakan artikel jurnal ilmiah**;** (3) membahas makanan tradisional, makanan lokal, warisan pangan, atau praktik pangan tradisional sebagai objek kajian; (4) memiliki keterkaitan dengan pembangunan lokal/perdesaan, ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan, inovasi, budaya, akses pasar, atau tata kelola; dan (5) menyediakan informasi mengenai tujuan, konteks, metode, dan temuan penelitian yang dapat dianalisis. Artikel dikeluarkan apabila: (1) diterbitkan di luar periode 1998–2024; (2) bukan artikel jurnal ilmiah; (3) tidak menjadikan makanan tradisional atau makanan lokal sebagai bagian substantif dari objek kajian; (4) hanya membahas aspek teknis pangan tanpa relevansi terhadap fokus sosial, ekonomi, budaya, pembangunan, pemberdayaan, atau tata kelola; atau (5) informasi teks penuh dan temuan penelitian tidak memadai untuk dilakukan sintesis.

Proses seleksi artikel dilakukan dalam empat tahap dengan mengadaptasi alur *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Pada tahap identifikasi (*identification*)**,** penelusuran literatur pada periode publikasi 1998–2024 menghasilkan 150 artikel dari database yang digunakan. Seluruh hasil pencarian kemudian dikompilasi dan diperiksa untuk mengidentifikasi artikel yang sama. Sebanyak 12 artikel ditemukan sebagai duplikasi dan dikeluarkan, sehingga tersisa 138 artikel untuk tahap penyaringan.

Pada tahap penyaringan (*screening*)**,** sebanyak 138 artikel diperiksa berdasarkan judul, kata kunci, dan abstrak. Artikel dikeluarkan apabila tidak memiliki keterkaitan substantif dengan makanan tradisional atau makanan lokal, ekonomi kreatif, pembangunan lokal/perdesaan, pemberdayaan masyarakat, inovasi, budaya, atau tata kelola yang menjadi fokus kajian. Berdasarkan proses tersebut, sebanyak 90 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi relevansi awal, sehingga 48 artikel dilanjutkan ke tahap pemeriksaan teks penuh.

Pada tahap kelayakan (*eligibility***)**, sebanyak 48 artikel diperiksa melalui pembacaan teks penuh. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian artikel dengan kriteria inklusi, meliputi periode publikasi 1998–2024, status sebagai artikel jurnal ilmiah, relevansi objek makanan tradisional atau makanan lokal, keterkaitan dengan pembangunan lokal/perdesaan, ekonomi kreatif, pemberdayaan, inovasi, budaya, pasar, atau tata kelola, serta ketersediaan informasi metodologis dan temuan yang memadai. Sebanyak 35 artikel dikeluarkan pada tahap ini karena tidak memenuhi satu atau lebih kriteria inklusi yang telah ditetapkan.

Pada tahap inklusi (*included***)**, sebanyak 13 artikel dinyatakan memenuhi seluruh kriteria dan ditetapkan sebagai korpus utama untuk sintesis tematik. Ketiga belas artikel tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan penulis dan tahun publikasi, lokasi atau konteks

penelitian, tujuan penelitian, metode, aktor yang terlibat, bentuk dukungan tata kelola, bentuk pemberdayaan SDM, inovasi produk, aspek budaya dan identitas lokal, akses pasar, temuan utama, serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan. Dengan demikian, proses seleksi menghasilkan 13 artikel dari 150 artikel awal**,** atau sekitar 8,67% dari keseluruhan hasil pencarian awal. Artikel terpilih kemudian digunakan untuk melakukan sintesis tematik mengenai hubungan antara administrasi pembangunan, pemberdayaan SDM lokal, dan pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan membutuhkan tiga fondasi utama, yaitu administrasi pembangunan yang responsif, pemberdayaan SDM lokal yang berkelanjutan, serta sinergi antaraktor dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif desa. Administrasi pembangunan berperan dalam menyediakan arah kebijakan, perencanaan, koordinasi, regulasi, fasilitasi, dan evaluasi program. Pemberdayaan SDM lokal berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat dalam produksi, inovasi, kewirausahaan, literasi digital, dan pengelolaan usaha. Sementara itu, sinergi antarkeduanya menjadi prasyarat penting agar ekonomi kreatif makanan tradisional dapat berkembang secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4.2 Peran Administrasi Pembangunan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengembangan makanan tradisional di wilayah perdesaan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan proses pembangunan lokal. Bessière (1998) menunjukkan bahwa makanan tradisional dan kuliner lokal dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan lokal melalui pemanfaatannya sebagai sumber daya budaya dan daya tarik ekonomi di wilayah perdesaan. Temuan tersebut diperkuat oleh Everett dan Aitchison (2008) yang menunjukkan bahwa makanan lokal dapat berperan dalam mempertahankan identitas wilayah sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Dengan demikian, makanan tradisional dapat dipahami sebagai salah satu sumber daya lokal yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi dalam pembangunan perdesaan.

Pada aspek pengembangan ekonomi masyarakat, Anthopoulou (2010) menunjukkan bahwa produksi pangan lokal dapat menjadi ruang bagi pengembangan kegiatan kewirausahaan masyarakat perdesaan, termasuk melalui keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dalam konteks Indonesia, Iskandar *et al.* (2023) menunjukkan pentingnya pengetahuan lokal masyarakat mengenai makanan tradisional dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan makanan tradisional tidak hanya berkaitan dengan produk, tetapi juga dengan kapasitas masyarakat dalam mengelola pengetahuan, sumber daya, produksi, dan aktivitas usaha.

Literatur mengenai inovasi juga menunjukkan bahwa pengembangan makanan tradisional membutuhkan keseimbangan antara pelestarian karakter tradisional dan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar. Guerrero *et al*. (2009) menemukan bahwa

pemahaman konsumen terhadap makanan tradisional berkaitan dengan karakteristik produk, cara produksi, sejarah, serta keterkaitannya dengan budaya dan tempat asal. Vanhonacker *et al*. (2013) selanjutnya menunjukkan bahwa inovasi dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap karakter tradisional dan penerimaan terhadap produk. Sementara itu, Fibri dan Frøst (2019), dalam konteks makanan tradisional Indonesia, menunjukkan bahwa konsumen dapat memberikan persepsi yang berbeda terhadap produk tradisional asli dan produk yang telah dimodernisasi. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi makanan tradisional membutuhkan pengelolaan yang mampu menghubungkan aspek pelestarian nilai tradisional dengan inovasi dan tuntutan pasar.

Dari perspektif ekonomi kreatif dan pembangunan lokal, Boccella dan Salerno (2016) menjelaskan keterkaitan ekonomi kreatif, industri budaya, dan pembangunan lokal. Zollet dan Qu (2024) juga menunjukkan bahwa pengembangan budaya pangan lokal dapat berkaitan dengan revitalisasi, keberlanjutan, dan pembentukan identitas tempat. Dalam konteks tersebut, makanan tradisional dapat ditempatkan sebagai bagian dari aset budaya dan ekonomi lokal yang membutuhkan dukungan ekosistem pembangunan, bukan hanya intervensi pada tingkat pelaku usaha individual.

Berdasarkan sintesis tersebut, administrasi pembangunan dapat diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan potensi makanan tradisional dengan agenda pembangunan lokal. Namun, perlu ditegaskan bahwa literatur yang ditelaah tidak secara langsung menunjukkan bahwa seluruh fungsi administrasi pembangunan—seperti perumusan kebijakan, penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Musrenbangdes, penganggaran, koordinasi lintas sektor, pengawasan, dan evaluasi—telah diteliti secara simultan dalam pengembangan makanan tradisional. Fungsi-fungsi tersebut merupakan interpretasi analitis dari temuan literatur mengenai pembangunan lokal, kewirausahaan, pemberdayaan, inovasi, ekonomi kreatif, dan revitalisasi budaya, sehingga hasil SLR menunjukkan adanya keterkaitan antara makanan tradisional, sumber daya budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan, inovasi, ekonomi kreatif, dan pembangunan lokal. Akan tetapi, masih terdapat ruang penelitian untuk mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut dalam perspektif administrasi pembangunan desa, khususnya mengenai bagaimana pemerintah desa dan aktor pembangunan lokal merencanakan, memfasilitasi, mengoordinasikan, memberdayakan, dan mengevaluasi pengembangan makanan tradisional sebagai bagian dari ekonomi kreatif perdesaan.

Literatur telah menunjukkan nilai makanan tradisional sebagai sumber daya budaya, ekonomi, lokal, objek inovasi, kewirausahaan, pemberdayaan, dan revitalisasi wilayah. Namun, literatur belum banyak mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut dengan mekanisme pembangunan desa secara utuh. Temuan ini sejalan dengan konsep *New Public Governance* yang menekankan bahwa penyelenggaraan urusan publik membutuhkan jaringan, kolaborasi, dan kemitraan lintas aktor (Osborne, 2006). Dalam pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional, pemerintah desa dan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan keterlibatan pelaku UMKM, kelompok perempuan, pemuda desa, BUMDes, koperasi, perguruan tinggi, lembaga pendamping, sektor swasta, dan pasar. Oleh karena itu, administrasi pembangunan perlu berperan sebagai pengarah dan penghubung yang memastikan setiap aktor memiliki kontribusi yang jelas dalam pengembangan ekonomi kreatif desa.

Selain itu, teori *collaborative governance* menegaskan bahwa kebijakan publik akan lebih efektif apabila dirumuskan dan dilaksanakan melalui proses kolaborasi antara lembaga publik dan aktor non-negara (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks ini, pengembangan makanan tradisional membutuhkan forum kolaboratif yang memungkinkan terjadinya dialog, pembagian peran, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama. Misalnya,

pemerintah desa dapat berperan dalam fasilitasi program dan regulasi, perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan inovasi produk, pelaku UMKM menjalankan produksi dan pemasaran, sedangkan sektor swasta dapat membuka akses jejaring pasar. Peran administrasi pembangunan juga dapat dilihat dari konsep *coproduction* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam menghasilkan nilai publik (Ostrom, 1996). Dalam pengembangan makanan tradisional, masyarakat desa bukan hanya penerima bantuan pemerintah, tetapi juga aktor utama yang memiliki pengetahuan lokal, resep tradisional, keterampilan produksi, serta pengalaman sosial budaya. Oleh karena itu, administrasi pembangunan harus menghindari pendekatan *top-down* yang hanya memberikan instruksi program. Sebaliknya, pemerintah perlu membangun ruang partisipasi agar masyarakat ikut merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program ekonomi kreatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi pembangunan berperan sebagai fondasi struktural bagi pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional. Tanpa dukungan administrasi pembangunan, potensi kuliner lokal berisiko tidak berkembang karena lemahnya perencanaan, kurangnya koordinasi, terbatasnya akses modal, rendahnya promosi, dan tidak berkelanjutannya program pembinaan. Hasil sintesis tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Hasil *Systematic Literature Review*

Temuan SLR	Artikel Sumber	Sintesis
Makanan tradisional merupakan bagian dari heritage, identitas lokal, dan sumber daya pembangunan perdesaan. Makanan dan gastronomi dapat menjadi penanda identitas wilayah sekaligus dimanfaatkan untuk mendukung produk lokal dan pariwisata perdesaan.	Bessière (1998)	Makanan tradisional tidak hanya mempunyai nilai konsumsi, tetapi juga merupakan aset budaya dan ekonomi lokal yang dapat dikaitkan dengan pembangunan wilayah.
Pengembangan makanan lokal melalui food tourism berkaitan dengan identitas regional, regenerasi perdesaan, diversifikasi pertanian, serta pelestarian heritage, keterampilan, dan cara hidup tradisional.	Everett & Aitchison (2008)	Makanan tradisional dapat menghubungkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan wilayah.
Makanan lokal dipersepsikan sebagai produk yang autentik dan merepresentasikan tempat serta budaya. Makanan lokal dapat menghubungkan konsumen dengan budaya dan warisan suatu wilayah.	Sims (2009)	Autentisitas dan keterikatan dengan tempat merupakan modal penting dalam pengembangan makanan lokal.
Konsumen mendefinisikan makanan tradisional melalui dimensi kebiasaan, asal/lokalitas, pengolahan, dan karakter sensoris. Inovasi dapat meningkatkan pasar, tetapi pada kondisi tertentu dapat mengurangi karakter tradisional produk.	Guerrero *et al*. (2009)	Pengembangan makanan tradisional menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan pelestarian karakter tradisional dan inovasi produk.
Usaha makanan tradisional skala kecil di perdesaan dapat menggunakan sumber daya lokal, resep tradisional, tenaga keluarga, dan tacit knowledge. Usaha tersebut juga menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap permintaan pasar.	Anthopoulou (2010)	Makanan tradisional dapat menjadi basis kewirausahaan lokal dan pemanfaatan kapasitas masyarakat, termasuk perempuan perdesaan.
Inovasi makanan tradisional dapat diterima konsumen, tetapi penerimaan dipengaruhi oleh bagaimana konsumen mendefinisikan makanan tradisional. Sebagian inovasi dapat gagal menarik konsumen baru.	Vanhonacker *et al*. (2013)	Inovasi harus mempertimbangkan persepsi tradisionalitas dan penerimaan konsumen.
Ekonomi kreatif dan industri budaya dapat menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lokal, dengan keterkaitan dengan modal sosial dan modal teritorial.	Boccella & Salerno (2016)	Makanan tradisional dapat ditempatkan dalam kerangka ekonomi kreatif berbasis aset budaya dan modal lokal.
Dalam konteks Indonesia, makanan tradisional dalam bentuk asli lebih sering dipersepsikan sebagai natural, original, dan autentik, sedangkan versi modern dipersepsikan lebih modern dan secara umum kurang disukai dibandingkan dengan versi tradisional dalam studi tersebut.	Fibri & Frøst (2019)	Modernisasi makanan tradisional perlu memperhatikan autentisitas dan preferensi konsumen.
Pengetahuan lokal masyarakat Sunda mengenai makanan tradisional berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan ketahanan pangan keluarga. Studi dilakukan pada masyarakat perdesaan Jawa Barat.	Iskandar *et al.* (2023)	Makanan tradisional merupakan bagian dari local knowledge dan kapasitas masyarakat yang memiliki fungsi sosial-ekonomi sekaligus pangan.

Penerimaan inovasi makanan tradisional dipengaruhi oleh karakter tradisional, kesehatan dan keamanan, familiaritas, segmentasi konsumen, kenyamanan, dan kepraktisan.	Abdullah & Putit (2023)	Pengembangan produk membutuhkan keseimbangan antara nilai tradisional, kebutuhan konsumen, keamanan, dan inovasi.
Revitalisasi budaya pangan lokal dapat berkaitan dengan sustainability dan place-making, termasuk hubungan antara aktor baru dengan budaya pangan lokal serta hubungan rural–urban.	Zollet & Qu (2024)	Pengembangan makanan lokal merupakan proses yang melibatkan banyak aktor dan pembentukan kembali hubungan antara pangan, tempat, budaya, dan pembangunan.

Sumber: Hasil Analisis dan Sintesis Peneliti, 2026.

4.3 Pemberdayaan SDM Lokal dalam Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia lokal merupakan salah satu aspek penting dalam keberlanjutan pengembangan makanan tradisional di wilayah perdesaan. Anthopoulou (2010) menunjukkan bahwa usaha makanan tradisional yang dijalankan oleh perempuan perdesaan memanfaatkan sumber daya lokal, resep tradisional, tenaga keluarga, serta *tacit knowledge* dan *know-how*. Studi tersebut juga menemukan bahwa pelaku usaha memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan pasar, meskipun kapasitas kewirausahaan mereka tidak terutama diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan vokasional. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman lokal merupakan modal penting dalam pengembangan aktivitas ekonomi berbasis makanan tradisional. Dimensi pengetahuan lokal juga ditunjukkan oleh Iskandar *et al*. (2023) melalui kajian pada masyarakat perdesaan Sunda di Cijambu, Sumedang, Jawa Barat. Studi tersebut mengidentifikasi kekayaan pengetahuan lokal masyarakat mengenai berbagai jenis makanan tradisional dan keterkaitannya dengan lingkungan serta ketahanan pangan keluarga. Dengan demikian, pengembangan makanan tradisional tidak hanya membutuhkan keterampilan produksi, tetapi juga pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan lokal yang menjadi dasar keberadaan produk tersebut.

Pada aspek inovasi, Vanhonacker *et al*. (2013) menunjukkan bahwa inovasi pada makanan tradisional berhubungan dengan persepsi konsumen terhadap karakter tradisional dan tingkat penerimaan produk. Temuan Fibri dan Frøst (2019) dalam konteks Indonesia juga menunjukkan bahwa proses modernisasi dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap atribut tradisional, autentisitas, originalitas, dan kesukaan terhadap produk. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan makanan tradisional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi makanan, tetapi juga dengan kemampuan memahami kebutuhan pasar dan melakukan inovasi tanpa menghilangkan karakter yang dipersepsikan sebagai tradisional. Selanjutnya, Zollet dan Qu (2024) menunjukkan bahwa aktivitas kewirausahaan kreatif berbasis pangan lokal dapat menjadi bagian dari proses revitalisasi perdesaan. Pelaku usaha berperan dalam menghubungkan sumber daya dan budaya pangan lokal dengan pengetahuan, keterampilan, serta pendekatan baru, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk baru dalam pemanfaatan budaya pangan lokal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan SDM lokal dapat dipahami sebagai proses penguatan kapasitas aktor untuk mengolah pengetahuan dan sumber daya lokal menjadi aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah. Berdasarkan sintesis tersebut, pemberdayaan SDM dalam pengembangan makanan tradisional dapat dimaknai sebagai proses penguatan pengetahuan lokal, keterampilan produksi, kemampuan beradaptasi terhadap pasar, kapasitas inovasi, dan kemampuan kewirausahaan. Namun, literatur yang ditelaah belum secara memadai menunjukkan bagaimana aspek-aspek tersebut dikembangkan melalui program pemberdayaan yang terintegrasi dengan administrasi pembangunan desa. Secara khusus, masih terbatas kajian yang menjelaskan bagaimana pemerintah desa memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaku makanan tradisional melalui pelatihan, pendampingan, akses

terhadap sumber daya, penguatan kelembagaan, pengembangan pasar, dan evaluasi program sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi kreatif perdesaan.

Kabeer (1999) menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup tiga dimensi, yaitu *resources*, *agency*, dan *achievements*. Dalam konteks ekonomi kreatif makanan tradisional, *resources* dapat berupa bahan baku lokal, pengetahuan tradisional, modal usaha, pelatihan, teknologi, dan jaringan pasar. *Agency* terlihat dari kemampuan pelaku usaha lokal untuk membuat keputusan, berinovasi, dan mengelola usaha. Sementara itu, *achievements* tampak melalui peningkatan pendapatan, perluasan pasar, kemandirian usaha, dan pelestarian budaya lokal. Pemberdayaan SDM lokal juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola aset lokal. Bebbington (1999) menekankan bahwa pembangunan perdesaan tidak hanya bergantung pada modal ekonomi, tetapi juga pada modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan kapabilitas masyarakat dalam menghubungkan aset tersebut dengan negara, pasar, dan masyarakat sipil. Dalam pengembangan makanan tradisional, aset lokal dapat berupa bahan pangan setempat, resep turun-temurun, keterampilan memasak, jaringan sosial, tradisi budaya, serta identitas desa. Seluruh aset tersebut akan memiliki nilai ekonomi apabila masyarakat memiliki kapasitas untuk mengolah, mengemas, memasarkan, dan mengembangkannya secara berkelanjutan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa literasi digital menjadi aspek penting dalam pemberdayaan SDM lokal. Nambisan (2017) menjelaskan bahwa teknologi digital telah mengubah cara peluang kewirausahaan diciptakan dan dikembangkan. Dalam konteks makanan tradisional, digitalisasi dapat membantu pelaku usaha desa memperluas pasar melalui media sosial, marketplace, katalog digital, sistem pemesanan daring, promosi visual, dan narasi merek berbasis kearifan lokal. Namun, digitalisasi tidak akan berjalan efektif apabila pelaku usaha tidak memiliki keterampilan digital dasar. Oleh sebab itu, pemberdayaan SDM lokal perlu memasukkan pelatihan digital sebagai bagian dari program pengembangan ekonomi kreatif desa. Pemberdayaan SDM lokal juga perlu memperhatikan aspek budaya. Makanan tradisional tidak boleh hanya dikembangkan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang memiliki nilai identitas. Bessière (1998) menjelaskan bahwa makanan tradisional dan gastronomi lokal dapat menjadi penanda identitas wilayah sekaligus sarana pembangunan lokal. Oleh karena itu, proses inovasi produk, pengemasan, dan pemasaran perlu tetap mempertahankan nilai keaslian, cerita lokal, dan karakter budaya masyarakat desa. Dengan demikian, pemberdayaan SDM lokal dalam ekonomi kreatif makanan tradisional harus diarahkan pada pembentukan pelaku usaha yang kreatif, mandiri, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki kesadaran budaya. Pemberdayaan yang hanya bersifat teknis dan sesaat tidak cukup untuk menciptakan keberlanjutan. Dibutuhkan pendampingan berkelanjutan agar masyarakat desa mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, memperkuat kelembagaan usaha, dan menjaga nilai budaya lokal.

4.4 Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional sebagai Modal Budaya dan Ekonomi Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan tradisional memiliki posisi strategis sebagai modal budaya sekaligus modal ekonomi dalam pembangunan perdesaan. Sebagai modal budaya, makanan tradisional merepresentasikan identitas, sejarah, nilai sosial, dan kearifan lokal masyarakat. Sebagai modal ekonomi, makanan tradisional dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang menghasilkan pendapatan, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan daya saing desa. Bessière (1998) menjelaskan bahwa makanan tradisional dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang mendukung pembangunan lokal. Everett dan Aitchison (2008) juga menunjukkan bahwa makanan lokal

dapat memperkuat identitas regional, mendukung regenerasi ekonomi, dan menghubungkan budaya dengan pembangunan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa makanan tradisional bukan sekadar produk konsumsi, tetapi memiliki potensi sebagai instrumen pembangunan berbasis identitas lokal. Sims (2009) menambahkan bahwa makanan lokal memiliki hubungan erat dengan autentisitas tempat. Konsumen tidak hanya membeli makanan karena rasa, tetapi juga karena pengalaman, cerita, asal-usul, dan nilai budaya yang melekat pada produk tersebut. Dalam konteks desa, hal ini berarti bahwa makanan tradisional dapat dipasarkan dengan pendekatan narasi lokal, misalnya dengan menonjolkan sejarah produk, bahan baku lokal, proses produksi tradisional, atau keterkaitannya dengan tradisi masyarakat.

Ekonomi kreatif memungkinkan makanan tradisional mengalami peningkatan nilai tambah. Boccella dan Salerno (2016) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif dan industri budaya dapat menjadi penggerak pembangunan lokal karena mengandalkan kreativitas, budaya, dan inovasi. Dalam pengembangan makanan tradisional, inovasi menjadi salah satu aspek penting untuk mempertahankan keberlanjutan produk di tengah perubahan kebutuhan konsumen. Guerrero *et al*. (2009) menunjukkan bahwa inovasi pada makanan tradisional perlu mempertimbangkan karakteristik yang dipersepsikan sebagai tradisional oleh konsumen. Vanhonacker *et al*. (2013) juga menemukan bahwa inovasi dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap karakter tradisional dan tingkat penerimaan produk. Dalam konteks Indonesia, Fibri dan Frøst (2019) menunjukkan adanya perbedaan persepsi konsumen terhadap makanan tradisional dalam bentuk asli dan produk yang telah dimodernisasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa inovasi produk dapat diarahkan untuk meningkatkan daya tarik dan penerimaan pasar, tetapi perlu tetap mempertahankan atribut yang berkaitan dengan autentisitas dan karakter tradisional. Selain aspek inovasi, literatur menunjukkan bahwa pengembangan makanan tradisional berkaitan dengan kapasitas pelaku dalam memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya lokal. Anthopoulou (2010) menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan lokal memanfaatkan resep tradisional, sumber daya lokal, tenaga keluarga, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman. Iskandar *et al*. (2023) juga menunjukkan pentingnya pengetahuan lokal masyarakat mengenai makanan tradisional sebagai bagian dari kapasitas masyarakat dan ketahanan pangan keluarga. Sementara itu, Zollet dan Qu (2024) memperlihatkan bahwa revitalisasi budaya pangan lokal dapat melibatkan aktor-aktor yang mengombinasikan sumber daya dan budaya lokal dengan pengetahuan serta keterampilan baru.

Dengan demikian, keberlanjutan makanan tradisional tidak hanya bergantung pada karakter produk, tetapi juga pada kapasitas masyarakat dalam mengembangkan dan mengadaptasi pengetahuan lokal. Namun demikian, hasil sintesis terhadap literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa penelitian mengenai makanan tradisional masih tersebar pada berbagai aspek, seperti autentisitas, inovasi produk, penerimaan konsumen, pengetahuan lokal, kewirausahaan, revitalisasi, dan pembangunan lokal. Aspek-aspek seperti sertifikasi halal, perizinan usaha, akses modal, literasi digital, pengelolaan keuangan, keamanan pangan, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha belum menjadi fokus utama dalam sebagian besar literatur makanan tradisional yang dianalisis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji pengembangan makanan tradisional secara lebih komprehensif dengan menghubungkan penguatan kapasitas pelaku, inovasi, akses pasar, digitalisasi, kelembagaan, dan dukungan pemerintah dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif perdesaan. Dalam perspektif administrasi pembangunan, sintesis tersebut memberikan implikasi bahwa pengembangan makanan tradisional memerlukan dukungan kelembagaan dan kebijakan yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan pasar. Namun, pernyataan mengenai bentuk dukungan spesifik seperti sertifikasi halal, perizinan, akses modal, dan literasi digital

perlu didukung oleh literatur tambahan yang secara eksplisit meneliti aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, kebutuhan terhadap administrasi pembangunan yang terarah merupakan hasil interpretasi sintesis penelitian, bukan temuan langsung dari satu artikel tertentu.

4.5 Sinergi Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan SDM Lokal

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan sangat ditentukan oleh sinergi antara administrasi pembangunan dan pemberdayaan SDM lokal. Administrasi pembangunan menyediakan kerangka kebijakan, regulasi, perencanaan, program, dan dukungan kelembagaan. Sementara itu, pemberdayaan SDM lokal menyediakan kapasitas manusia yang menjalankan inovasi, produksi, pemasaran, dan pelestarian budaya. Sinergi tersebut dapat dijelaskan melalui tiga pola hubungan. Pertama, administrasi pembangunan berperan mengidentifikasi potensi lokal dan memasukkannya ke dalam agenda pembangunan desa. Kedua, pemberdayaan SDM lokal berperan mengolah potensi tersebut menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah. Ketiga, kolaborasi antaraktor berperan dalam memperluas dukungan, akses pasar, teknologi, dan keberlanjutan program. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Model Sinergi Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan SDM Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional

Komponen Utama	Peran dalam model	Hasil yang diharapkan	Sumber sintesis
Administrasi pembangunan	Integrasi kebijakan, perencanaan, koordinasi, dan fasilitasi potensi makanan tradisional	Makanan tradisional menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi lokal	Bessière (1998); Everett dan Aitchison (2008); Boccella dan Salerno (2016); Zollet & Qu (2024)
Pemberdayaan SDM lokal	Penguatan pengetahuan lokal, keterampilan, kewirausahaan, adaptasi pasar, dan inovasi	Kapasitas dan kemandirian pelaku usaha meningkat	Anthopoulou (2010); Iskandar *et al*. (2023); Zollet & Qu (2024)
Inovasi makanan tradisional	Adaptasi produk terhadap kebutuhan konsumen dengan mempertahankan karakter tradisional	Daya tarik dan penerimaan pasar meningkat	Guerrero *et al*. (2009); Vanhonacker *et al*. (2013); Fibri dan Frøst (2019); Abdullah dan Putit (2023)
Kelembagaan dan kolaborasi	Menghubungkan pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan aktor pendukung	Ekosistem pengembangan makanan tradisional lebih terkoordinasi	Zollet dan Qu (2024); Ansell dan Gash (2008); Osborne (2006)
Digitalisasi dan pasar	Pemanfaatan teknologi untuk kewirausahaan dan perluasan pasar	Jangkauan pasar semakin luas	Nambisan (2017)
Pelestarian budaya	Menjaga pengetahuan, resep, autentisitas, identitas, dan keterikatan tempat	Nilai budaya tetap terpelihara dalam proses komersialisasi	Bessière (1998); Sims (2009); Guerrero *et al*. (2009); Fibri dan Frøst (2019); Iskandar *et al*. (2023); Zollet dan Qu (2024)

Sumber: Hasil Sintesis Peneliti diolah dari Berbagai Literatur, 2026.

Model tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional tidak dapat bertumpu hanya pada satu aspek. Apabila administrasi pembangunan kuat, tetapi SDM lokal tidak diberdayakan, maka program akan cenderung bersifat formal dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki keterampilan, tetapi tidak didukung oleh kebijakan, kelembagaan, dan akses pasar, maka usaha makanan tradisional

akan sulit berkembang. Oleh karena itu, sinergi keduanya menjadi kunci keberhasilan. Temuan ini sejalan dengan Rosyadi *et al*., (2021) yang menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif perdesaan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, dukungan kebijakan, dan penguatan kapasitas organisasi. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi lintas sektor dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pelaku UMKM, perguruan tinggi, komunitas kreatif, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting karena pelaku usaha makanan tradisional sering menghadapi keterbatasan modal, teknologi, pengetahuan pasar, dan jaringan distribusi. Sinergi administrasi pembangunan dan pemberdayaan SDM lokal juga berkontribusi terhadap pembangunan desa yang inklusif. Handoyo *et al*. (2021) menunjukkan bahwa pembangunan desa memiliki hubungan dengan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi desa. Namun, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara luas, program ekonomi kreatif harus melibatkan kelompok masyarakat yang beragam, termasuk perempuan, pemuda, rumah tangga pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

4.6 Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional di Perdesaan

Berdasarkan hasil sintesis literatur, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Makanan Tradisional di Perdesaan

Strategi	Bentuk Implementasi	Dampak yang Diharapkan	Sintesis dari Literatur
Integrasi dalam perencanaan pembangunan desa	Menempatkan makanan tradisional sebagai bagian dari agenda pengembangan potensi ekonomi, budaya, dan identitas lokal dalam perencanaan pembangunan desa	Pengembangan makanan tradisional lebih terarah dan terhubung dengan agenda pembangunan lokal	Bessière (1998); Everett dan Aitchison (2008); Boccella dan Salerno (2016); Zollet dan Qu (2024)
Penguatan kapasitas SDM lokal	Penguatan pengetahuan lokal, keterampilan produksi, kewirausahaan, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap pasar	Pelaku lokal memiliki kapasitas, kreativitas, dan kemandirian ekonomi yang lebih baik	Anthopoulou (2010); Iskandar *et al.* (2023); Zollet dan Qu (2024)
Inovasi produk makanan tradisional	Pengembangan produk dan bentuk penyajian yang menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan tetap mempertahankan karakter tradisional	Produk lebih adaptif terhadap pasar tanpa kehilangan identitas tradisional	Guerrero *et al*. (2009); Vanhonacker *et al*. (2013); Fibri dan Frøst (2019); Abdullah dan Putit (2023)
Penguatan kelembagaan dan jejaring ekonomi lokal	Pengorganisasian pelaku usaha dan pengembangan hubungan antara masyarakat, komunitas, pemerintah, dan aktor pendukung	Ekosistem usaha lebih terorganisasi dan hubungan antarpelaku menjadi lebih kuat	Anthopoulou (2010); Boccella dan Salerno (2016); Zollet dan Qu (2024)

Strategi	Bentuk Implementasi	Dampak yang Diharapkan	Sintesis dari Literatur
Pengembangan akses pasar dan digitalisasi	Pemanfaatan teknologi digital dan saluran pemasaran baru untuk memperkenalkan serta memperluas jangkauan produk	Akses pasar dan peluang kewirausahaan menjadi lebih luas	Nambisan (2017); Zollet dan Qu (2024);
Pelestarian nilai budaya dan autentisitas	Penguatan identitas lokal, pengetahuan tradisional, narasi produk, dan karakter autentik makanan	Nilai budaya tetap terpelihara sekaligus menjadi sumber nilai ekonomi	Bessière (1998); Sims (2009); Guerrero *et al*. (2009); Fibri & Frøst (2019); Iskandar *et al*. (2023); Zollet dan Qu (2024)
Kolaborasi lintas aktor	Pengembangan kerja sama pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan aktor pendukung lainnya	Terbentuk ekosistem pengembangan ekonomi kreatif yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan	Zollet dan Qu (2024); Ansell dan Gash (2008); Osborne (2006)
Keberlanjutan ekonomi lokal	Mengintegrasikan budaya lokal, kapasitas SDM, inovasi, kewirausahaan, akses pasar, dan pembangunan lokal	Makanan tradisional berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan	Bessière (1998); Everett dan Aitchison (2008); Boccella dan Salerno (2016); Zollet dan Qu (2024)

Sumber: Hasil Sintesis Peneliti Berdasarkan berbagai Literatur (1998–2024).

Strategi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif makanan tradisional perlu dikembangkan secara terintegrasi. Pemerintah desa tidak cukup hanya memberikan bantuan alat produksi, tetapi perlu membangun ekosistem yang mendukung seluruh proses usaha, mulai dari produksi, pengemasan, legalitas, promosi, pemasaran, sampai evaluasi keberlanjutan. Di sisi lain, masyarakat lokal perlu diberdayakan agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan adaptif terhadap perubahan pasar.

4.7 Implikasi terhadap Administrasi Negara

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kajian administrasi negara. Pertama, administrasi pembangunan perlu dipahami bukan hanya sebagai proses birokratis, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Administrasi pembangunan harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat desa mengembangkan potensi lokalnya secara produktif. Kedua, pengembangan ekonomi kreatif perdesaan membutuhkan tata kelola kolaboratif. Pemerintah perlu mengubah perannya dari sekadar pelaksana program menjadi fasilitator, koordinator, dan penggerak kolaborasi. Dalam konteks ini, administrasi negara harus mampu membangun jejaring antara pemerintah, masyarakat, pasar, akademisi, dan sektor swasta. Ketiga, pemberdayaan SDM lokal harus menjadi inti dari pembangunan perdesaan. Program pembangunan yang tidak memperkuat kapasitas masyarakat berisiko tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pelatihan, pendampingan, literasi digital, penguatan kelembagaan, dan perluasan akses pasar harus menjadi bagian dari agenda administrasi pembangunan. Keempat, ekonomi kreatif makanan

tradisional dapat menjadi model pembangunan berbasis kearifan lokal. Model ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pelestarian budaya, penguatan identitas desa, dan pembangunan berkelanjutan. Duxbury *et al*. (2017) menegaskan bahwa kebijakan budaya dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama melalui pelestarian praktik budaya dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap nilai lokal. Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa administrasi pembangunan dan pemberdayaan SDM lokal memiliki hubungan yang saling menguatkan. Administrasi pembangunan menyediakan dukungan struktural, sedangkan SDM lokal menyediakan kreativitas, keterampilan, dan energi sosial untuk mengembangkan ekonomi kreatif makanan tradisional. Sinergi keduanya dapat mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif, partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal masyarakat.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis makanan tradisional di perdesaan. Peran tersebut terlihat melalui fungsi perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, koordinasi lintas aktor, fasilitasi permodalan dan perizinan, penguatan kelembagaan, serta pengawasan dan evaluasi program. Administrasi pembangunan menjadi instrumen penting yang menghubungkan potensi lokal masyarakat desa dengan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks makanan tradisional, administrasi pembangunan tidak hanya berperan sebagai mekanisme birokratis, tetapi juga sebagai penggerak yang mampu menjadikan potensi kuliner lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa.

Pemberdayaan SDM lokal merupakan faktor utama dalam pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan. Pemberdayaan tersebut tidak hanya terbatas pada peningkatan keterampilan teknis dalam memproduksi makanan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kewirausahaan, inovasi produk, pengemasan, manajemen usaha, literasi digital, pemasaran, serta kesadaran terhadap nilai budaya lokal. SDM lokal yang berdaya akan mampu mengolah makanan tradisional dari sekadar warisan budaya menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah, daya saing, dan peluang pasar yang lebih luas. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi kreatif perdesaan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat lokal mampu menjadi pelaku utama pembangunan, bukan hanya sebagai penerima program pemerintah.

Sinergi antara administrasi pembangunan dan pemberdayaan SDM lokal terbukti menjadi dasar penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan. Administrasi pembangunan menyediakan arah kebijakan, dukungan program, kelembagaan, regulasi, dan fasilitas pembangunan, sedangkan pemberdayaan SDM lokal menyediakan kemampuan, kreativitas, inovasi, dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. Apabila kedua aspek tersebut berjalan secara terpadu, maka ekonomi kreatif makanan tradisional dapat berkembang secara lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sinergi ini juga memungkinkan terciptanya pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada pelestarian kearifan lokal, penguatan identitas budaya, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan tidak dapat dilepaskan dari tata kelola pembangunan yang baik dan kapasitas SDM lokal yang kuat. Makanan tradisional memiliki potensi besar sebagai modal budaya sekaligus modal ekonomi, tetapi potensi tersebut memerlukan dukungan

kebijakan, pendampingan, inovasi, digitalisasi, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, administrasi pembangunan dan pemberdayaan SDM lokal harus dipandang sebagai dua komponen yang saling melengkapi dalam menciptakan pembangunan ekonomi kreatif perdesaan yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis pada potensi lokal masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu memperkuat peran administrasi pembangunan dalam pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional melalui perencanaan program yang lebih sistematis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Potensi makanan tradisional perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti RPJMDes, RKPDes, maupun program pemberdayaan masyarakat desa, agar pengembangannya tidak bersifat insidental atau seremonial. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan pelaku UMKM, BUMDes, koperasi, perguruan tinggi, komunitas kreatif, lembaga keuangan, dan sektor swasta agar pengembangan ekonomi kreatif desa dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Pelaku usaha lokal dan masyarakat desa perlu terus didorong untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tersebut perlu mencakup keterampilan produksi, pengolahan makanan yang higienis, inovasi rasa, desain kemasan, pencatatan keuangan sederhana, legalitas usaha, sertifikasi produk, pemasaran digital, serta kemampuan membangun merek berbasis identitas lokal. Dengan penguatan kapasitas tersebut, makanan tradisional tidak hanya dapat dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Pemerintah desa bersama lembaga pendamping juga perlu memperkuat kelembagaan ekonomi lokal sebagai wadah pengembangan usaha makanan tradisional. Kelembagaan seperti kelompok usaha, koperasi, komunitas UMKM, atau BUMDes dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama antar pelaku usaha, mempermudah akses pembinaan, meningkatkan daya tawar, serta memperluas jaringan pemasaran. Penguatan kelembagaan ini penting agar pengembangan makanan tradisional tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi gerakan ekonomi lokal yang terorganisasi dan memiliki arah pengembangan yang jelas.

Selain itu, digitalisasi perlu dijadikan sebagai bagian penting dari strategi pengembangan ekonomi kreatif makanan tradisional di perdesaan. Pemerintah dan lembaga pendamping perlu membantu pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan media sosial, marketplace, katalog digital, foto produk, pembayaran digital, dan promosi berbasis cerita lokal. Digitalisasi tidak hanya berfungsi untuk memperluas pasar, tetapi juga dapat menjadi media untuk memperkenalkan identitas budaya, sejarah produk, bahan baku lokal, dan nilai kearifan masyarakat desa kepada konsumen yang lebih luas.

Kajian ini juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan pendekatan empiris melalui studi kasus, wawancara, observasi, atau survei terhadap pelaku ekonomi kreatif makanan tradisional di desa. Penelitian lanjutan diperlukan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan administrasi pembangunan dijalankan, bagaimana pemberdayaan SDM lokal dilakukan, serta sejauh mana sinergi antaraktor mampu meningkatkan keberlanjutan ekonomi kreatif perdesaan. Dengan demikian, hasil kajian berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih konkret dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan administrasi pembangunan berbasis ekonomi kreatif lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, K. M., & Putit, L. (2023). The determinants influencing consumer acceptance of innovative traditional food products: A systematic literature review. *Advances in Social Sciences Research Journal, 10*(6.2), 330–344. https://doi.org/10.14738/assrj.106.2.15006

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Anthopoulou, T. (2010). Rural women in local agrofood production: Between entrepreneurial initiatives and family strategies: A case study in Greece. *Journal of Rural Studies, 26*(4), 394–403. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2010.03.004

Bakhshi, H., & McVittie, E. (2009). Creative supply-chain linkages and innovation: Do the creative industries stimulate business innovation in the wider economy? *Innovation*, *11*(2), 169–189. https://doi.org/10.5172/impp.11.2.169

Bebbington, A. (1999). Capitals and capabilities: A framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty. *World Development*, *27*(12), 2021–2044. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00104-7

Bessière, J. (1998). Local development and heritage: Traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. *Sociologia Ruralis*, *38*(1), 21–34. https://doi.org/10.1111/1467-9523.00061

Boccella, N., & Salerno, I. (2016). Creative economy, cultural industries and local development. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *223*, 291–296. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.370

BPS. (2025). Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html

Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (Eds.). (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. SAGE Publications.

Del Soldato, E., & Massari, S. (2024). Creativity and digital strategies to support food cultural heritage in Mediterranean rural areas. *EuroMed Journal of Business*, *19*(1), 113–137. https://doi.org/10.1108/EMJB-05-2023-0152

Dewi, N. Y. S., Abdillah, M. Z., Hulaimi, A., Agustina, A., & Aini, N. (2025). Pelatihan strategi pemasaran digital, branding dan packaging modern pada UMKM jamu tradisional. *Journal of Community Empowerment*, *4*(2). https://doi.org/10.31764/jce.v4i2.33987

Duxbury, N., Kangas, A., & De Beukelaer, C. (2017). Cultural policies for sustainable development: Four strategic paths. *International Journal of Cultural Policy*, *23*(2), 214–230. https://doi.org/10.1080/10286632.2017.1280789

Dwiputri, I. N., Prastiwi, L. F., & Permana, Y. H. (2025). Driving Digital Adoption within Small Business: A Case Study of Indonesia Micro-Small-Medium Enterprises. *Jurnal Economia: Review of Business and Economics Studies*, *21*(2), 304–315. https://doi.org/10.21831/economia.v21i2.67494

El Bagoury, A., & Reyad, D. (2023). Development administration in the developing countries between the characteristics of national bureaucracy and the implications of international pressures. *The Arab Journal of Administration*, *43*(4), 279–302. https://doi.org/10.21608/aja.2021.66300.1060

Elliott, I. C., Puppim, J. A. de O., & Wu, A. M. (2024). Public administration and development in (historical) perspective. *Public Administration and Development*, *44*(4), 298–314. https://doi.org/10.1002/pad.2052

Everett, S., & Aitchison, C. (2008). The role of food tourism in sustaining regional identity: A case study of Cornwall, South West England. *Journal of Sustainable Tourism*, *16*(2), 150–167. https://doi.org/10.2167/jost696.0

Fibri, D. L. N., & Frøst, M. B. (2019). Consumer perception of original and modernised traditional foods of Indonesia. *Appetite, 133*, 61–69. https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.10.026

Guerrero, L., Guàrdia, M. D., Xicola, J., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Zakowska-Biemans, S., Sajdakowska, M., Sulmont-Rossé, C., Issanchou, S., Contel, M., Scalvedi, M. L., Granli, B. S., & Hersleth, M. (2009). Consumer-driven definition of traditional food products and innovation in traditional foods: A qualitative cross-cultural study. *Appetite*, *52*(2), 345–354. https://doi.org/10.1016/j.appet.2008.11.008

Handoyo, F., Hidayatina, A., & Purwanto, P. (2021). The Effect of Rural Development on Poverty Gap, Poverty Severity and Local Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *13*(3), 369–381. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.369-381

Iskandar, B. S., Iskandar, J., Mulyanto, D., & Aliifah, F. (2023). Local knowledge of the Sundanese community on traditional foods to enhance the family food security. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, *8*(1), 76–89. https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1.24461

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, *30*(3), 435–464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. (2026, July 11). *Rindekraf 2026–2045 optimalkan daerah jadikan ekraf the new engine of growth.* https://ekraf.go.id/news/rindekraf-2026-2045-optimalkan-daerah-jadikan-ekraf-the-new-engine

Mangai, M. S. (2022). A review of classical thoughts on contemporary public administration in developing countries. *Public Administration*, *100*(1), 173–176. https://doi.org/10.1111/padm.12792

Nambisan, S. (2017). Digital Entrepreneurship: Toward a Digital Technology Perspective of Entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, *41*(6), 1029–1055. https://doi.org/10.1111/etap.12254

OECD. (2025). *Start-up Asia: Chasing the innovation frontier*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/start-up-asia_a9b71040-en/full-report/start-ups-in-asia-are-chasing-the-innovation-frontier_a478359d.html

Ohemeng, F. L. K. (2023). Colonial legacy in development administration. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 1843–1850). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_3139

Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? 1. *Public Management Review*, *8*(3), 377–387. https://doi.org/10.1080/14719030600853022

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development*, *24*(6), 1073–1087. https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023-X

Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, *23*(5), 569–579. https://doi.org/10.1007/BF02506982

Puppim de Oliveira, J. A. (2021). Public administration and development. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1374

Purbasari, R., Wijaya, C., & Rahayu, N. (2021). Identifikasi aktor dan faktor dalam ekosistem kewirausahaan: Kasus pada industri kreatif di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. *AdBispreneur*, *5*(3), 241-262. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i3.29003

Rondinelli, D. A. (1979). Administration of integrated rural development policy: The politics of agrarian reform in developing countries. *World Politics*, *31*(3), 389–416. https://doi.org/10.2307/2009994

Rondinelli, D. A. (1982). The dilemma of development administration: Complexity and

uncertainty in control-oriented bureaucracies. *World Politics*, *35*(1), 43–72. https://doi.org/10.2307/2010279

Rosyadi, S., Sabiq, A., Ahmad, A. A., & Yamin, M. (2021). The Cross-Sector Collaboration for Development Policy of Rural Creative Economy: The Case of Bengkoang Creative Hub. *Journal of Governance and Public Policy*, *8*(1), 10–21. https://doi.org/10.18196/jgpp.811339

Septiyanti, R., Rosiana, N., & Maryono. (2026). Faktor yang Memengaruhi Penerapan Digital Marketing serta Dampaknya terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, *14*(1), 142–154. https://doi.org/10.29244/jai.2026.14.01.142-154

Sims, R. (2009). Food, place and authenticity: local food and the sustainable tourism experience. *Journal of Sustainable Tourism*, *17*(3), 321–336. https://doi.org/10.1080/09669580802359293

Syafaruddin. (2025). Development administration: Challenges and strategies for sustainable governance in the 21st century. *Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humanities Innovation, 2*(1). https://doi.org/10.70062/icsshi.v2i1.64

UNCTAD. (2021). *Unlocking the potential of intellectual property rights to support the creative economy*. United Nations Conference on Trade and Development.

UNCTAD. (2022). *Creative economy outlook 2022*. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2022d1_en.pdf

UNCTAD. (2024). *Creative economy outlook 2024*. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2024d2_en.pdf

Vanhonacker, F., Kühne, B., Gellynck, X., Guerrero, L., Hersleth, M., & Verbeke, W. (2013). Innovations in traditional foods: Impact on perceived traditional character and consumer acceptance. *Food Research International*, *54*(2), 1828–1835. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2013.10.027

Zollet, S., & Qu, M. (2024). Creative newcomers and local food culture: revitalization, sustainability, and place-making between rural and urban. *Food, Culture & Society*, 1–19. https://doi.org/10.1080/15528014.2024.2443331